

KONTRIBUSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DAN KEBERPIHAKAN PEMERINTAH

Umar Said

1). Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Abstrak:

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan keberpihakan pemerintah. Metode yang digunakan dalam Kajian ini adalah deskriptif. Tipe kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah tipe kajian deskriptif. Berdasarkan hasil kajian disimpulkan bahwa: 1). Tingginya antusiasme siswa untuk bersekolah di SMK, juga tidak dibarengi dengan kesiapan sebagian besar SMK di Kabupaten Situbondon untuk menyiapkan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang handal dan kompeten, sehingga hal tersebut pada akhirnya berdampak kurang optimalnya tujuan peningkatan sumber daya peserta didik. 2). Keberpihakan pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan SMK masih belum optimal, hal tersebut terlihat dari tidak adanya kebijakan makro berupa Peraturan Daerah (Perda) dalam pengelolaan dan pengembangan SMK. Sedangkan kebijakan secara mikro yang dilakukan oleh dinas terkait, masih belum optimal dan profesional dalam implementasinya, hal tersebut terlihat dari belum mampunya dinas pendidikan melakukan inovasi dalam pembinaan terhadap SMK.

Kata Kunci: Sekolah, Pemerintah dan Sumber Daya Manusia.

PENDAHULUAN

Kebijakan pengembangan pendidikan menengah kejuruan di Indonesia, hendaknya diarahkan pada pengembangan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta meningkatkan daya saingnya dalam sektor tenaga kerja. Berdasarkan kajian dari *United Nations Development Program* (UNDP) tahun 2014 menunjukkan bahwa kualitas SDM Indonesia menempati peringkat 110 dari 170 negara yang menjadi sampel kajian. Kajian ini memberikan hasil bahwa kualitas SDM Indonesia merupakan SDM terendah di kawasan *Association of South East Asia* (ASEAN). Kajian ini pula menunjukkan bahwa Malaysia yang dahulu menjadikan Indonesia tolak ukur dewasa ini mempunyai peringkat 76 dan Filipina rangking 98. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia secara umum tergolong rendah.

Oleh karena itu, perubahan arah kebijakan pengembangan pendidikan kejuruan diperlukan, ke arah transformasi kualitas SDM (pengetahuan, kemampuan dan keterampilan). Hal ini ditunjukkan dengan perubahan porsi perbandingan antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 70 persen dan Sekolah Menengah Umum (SMA) sebesar 30 persen. Hal ini memeberikan dasar bahwa SMK merupakan salah satu lembaga pendidikan menengah yang menjadi prioritas pemerintah dalam pengembangan SDM. Perubahan porsi pendidikan menengah ini memberikan sebuah eforia bahwa SMK diharapkan mampu memberikan pendidikan yang berkualitas dan aplikatif kepada masyarakat Indonesia.

Kebijakan pengembangan pendidikan pada SMK di dasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan SMK yang memenuhi standar nasional pendidikan dengan berbasis keunggulan lokal merupakan wewenang Bupati atau Walikota, yang saat ini pengelolaan SMK dan SMA sudah diambil alih oleh pemerintah provinsi.

Bidang studi keahlian yang dimiliki SMK yang dapat dikembangkan berdasarkan keunggulan lokal mencakup 1) teknologi dan rekayasa; 2) kesehatan; 3) seni, kerajinan

dan pariwisata; 4) teknologi informasi dan komunikasi; 5) agribisnis dan agroteknologi; 6) bisnis dan manajemen; 7) dan bidang studi lain yang diperlukan masyarakat.

Arahan pengembangan SMK di Indonesia pada tahun 2016 di dasarkan pada Garis-Garis Besar Program Pembinaan SMK Tahun 2012 (Direktorat Pembinaan SMK, 2012). Pemerintah Indonesia mempunyai priotas dalam program pembangunan di bidang pendidikan dengan meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan, dan menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

Lebih lanjut, dalam pengembangan SMK mempunyai 5 unsur penting yaitu akses pendidikan dasar-menengah, metodologi, pengelolaan, kurikulum dan kualitas (Direktorat Pembinaan SMK, 2012). Dalam unsur akses pendidikan, Pemerintah Indonesia mempunyai capaian angka partipasi pendidikan menengah dari 69 prosen tahun 2009 menjadi 85 prosen pada tahun 2014, penurunan harga buku standar sebesar 30-50 prosen, dan penyediaan fasilitas internet untuk SMK. Sedangkan, pada subtansi, penerapan metodologi pendidikan difokuskan pada pendidikan yang memperhatikan kemampuan sosial, watak budi pekerti, kecintaan terhadap budaya dan Bahasa Indonesia melalui penyesuaian sistem ujian akhir nasional pada tahun 2012 dan penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah yang diterapkan di 25 prosen sekolah pada tahun 2012 dan 100 prosen pada tahun 2014. Unsur pengelolaan mencakup pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas *quality assurance*, mendorong pengaktifan peran komite sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan dewan pendidikan di tingkat Kabupaten.

Unsur kurikulum diarahkan pada pengembangan kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan lulusan yang mampu menjawab kebutuhan SDM dalam mendukung

pertumbuhan nasional dan daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan dengan pengembangan model *link and match*. Dan yang terakhir adalah kualitas yang diarahkan pada penjaminan mutu melalui sertifikasi ISO 9001:2008, pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SPN), serta peningkatan kompetensi lulusan agar dapat bersaing di dunia kerja.

Kebijakan pengembangan SMK dituangkan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mempunyai tujuan tersedianya dan terjangkau layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi (Direktorat Pembinaan SMK, 2016). Adapun sasaran strategis dari tujuan tersebut yang hendak dicapai 2014 adalah sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) nasional melampaui 34 persen;
2. Sekurang-kurangnya 66 persen SMK berakreditasi;
3. Sekurang-kurangnya 60 persen kabupaten/kota memiliki SMK dan SMK SBI atau RSBI;
4. 70 persen SMK bersertifikat ISO 9001:2008;
5. Sekurang-kurangnya 90 persen SMK melaksanakan pembelajaran elektronik;
6. 70 persen Lulusan SMK Bekerja pada Tahun Kelulusan;
7. 85 persen SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan;
8. Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan gender menjadi 95 persen;
9. Seluruh SMK menerapkan pembelajaran yang membangun karakter.

Dalam ranah daerah, penerapan kebijakan pada bidang pendidikan dapat ditinjau dari potensi pengembangan SMK, salah satunya dapat dilihat di Kabupaten Situbondo. Kabupaten Situbondo merupakan salah satu daerah yang potensial dalam upaya pengembangan pendidikan kejuruan melalui transformasi SDM Sekolah Menengah Kejuruan.

Dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah kejuruan Kabupaten Situbondo mempunyai jumlah SMK sebesar 27 sekolah pada tahun 2012.

Komposisi Jumlah SMK tersebut didominasi oleh SMK swasta sebesar 21 sekolah sedangkan SMK negeri sebesar 6 sekolah. Kuantitas SMK di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya pada tahun 2011 yang berjumlah sebesar 26 sekolah dengan SMK negeri sebesar 6 sekolah dan swasta 20 sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa respon prasarana dalam pengembangan pendidikan di SMK mengalami peningkatan di Kabupaten Situbondo yang diharapkan meningkatkan jumlah siswa yang akan menjadi input dalam pasar tenaga kerja di masa datang

Realita pendidikan selama periode tahun 2001-2014, terdapat perkembangan jumlah siswa pada tingkat pendidikan menengah di Kabupaten Situbondo, mengalami peningkatan jumlah peserta didik SMK negeri Kabupaten Situbondo mencapai 155 persen selama periode 2007-2011. Sedangkan jumlah peserta didik pada SMK swasta mengalami peningkatan sekitar 70 persen. Kondisi ini menunjukkan perubahan arah fokus pendidikan di Kabupaten Situbondo yang semula memilih SMA sebagai pilihan publik lembaga pendidikan menengah menjadi SMK di Kabupaten Situbondo. Fenomena ini sebuah euforia baru dalam ranah pilihan publik terhadap kesiapan pendidikan menengah dalam merespon pasar tenaga kerja di Kabupaten Situbondo.

Di sisi lain, dalam ranah sumber daya pendidik pada tingkat SMK mengalami peningkatan yang signifikan sekitar 77,7 persen dan swasta sebesar 9 persen selama periode tahun 2007-2011. Namun demikian, untuk di Kabupaten Situbondo masih terkendala tidak adanya regulasi yang legal seperti Peraturan Daerah (Perda) dalam pengembangan pendidikan SMK, sehingga banyak kepala sekolah baik pada SMK Negeri dan Swasta yang stagnan dalam pengelolaan institusinya, kepala sekolah banyak tidak berani membuat keputusan diskresi tentang pengembangan SMK-nya.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimanakah kontribusi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan keberpihakan pemerintah ?

1.3 Tujuan Kajian

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan keberpihakan pemerintah.

1.4 Kerangka Konseptual

A. Definisi Pendidikan Menengah Kejuruan

Evan (1978) menyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan sistem pendidikan yang menciptakan individu untuk lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan dari pada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Sedangkan, Diane dan Mattuci (2006) menunjukkan bahwa sekolah kejuruan memberikan pendidikan yang berbeda dengan sekolah lanjutan umum yang memberikan teori ilmu untuk dikembangkan secara murni. Pendidikan kejuruan suatu program yang berada di bawah pendidikan tinggi yang diorganisir menyiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja tertentu atau meningkatkan pekerjaan dalam dunia kerja (Good, 1959).

Menurut Wenrich dan Wenrich (1976), sekolah kejuruan adalah seluruh proses pendidikan yang bertujuan untuk 1) pengembangan kompetensi; 2) pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar; 3) kompetensi yang berfungsi secara efektif; dan 4) kompetensi yang berkaitan dengan sektor usaha tertentu dalam pasar.

Dalam artian definitif, pendidikan menengah kejuruan merupakan pendidikan yang bertujuan untuk penguasaan pengetahuan dan ketrampilan yang mempunyai nilai ekonomis, sesuai dengan kebutuhan pasar dengan *education labor coefficient* tinggi (Nurhadi, 2008). Di sisi lain dalam *United States Congress* (1976), pendidikan menengah kejuruan adalah program pendidikan yang secara langsung dikaitkan dengan penyiapan seseorang untuk suatu pekerjaan tertentu atau untuk persiapan tambahan karir seseorang. Menurut Wagiran (2010), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan sarana pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah.

B. Model Pendidikan Menengah Kejuruan

Model sistem pendidikan kejuruan mempunyai beberapa bentuk yaitu (Djojonegoro, 1998):

- *Market Model*

Sistem pendidikan yang merupakan tanggung jawab industri dan di jalankan sepenuhnya oleh industri. Pada model pasar pemerintah tidak terlibat dalam proses kualifikasi kejuruan. Model ini sering juga disebut Model Liberal dan langsung di arahkan pada produksi dan pasaran kerja.

- *School Model*: Sistem pendidikan di mana pemerintah berperan merencanakan, mengorganisasikan, dan memantau pelaksanaan pendidikan kejuruan. Model ini sering juga disebut Model Birokratik.

- *Dual System*: Sistem pendidikan antara *market model* dan *school model*. Pemerintah berperan sebagai pengawas model pasar.

- *Cooperative Education*: Pendidikan kejuruan yang diselenggarakan bersama antara sekolah dan perusahaan. Pendidikan ini terdiri atas *School and Enterprise* dan *Training Center and Enterprise*. *School and Enterprise* adalah pendidikan kejuruan yang merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah dan industri. *Training Center and Enterprise*.

- *Informal Vocational Education*: Sistem pendidikan yang lahir dengan sendirinya, atas inisiatif pribadi atau kelompok untuk memenuhi ketrampilan yang tidak dapat dipenuhi di pendidikan formal.

Kajian ini menggunakan model sekolah birokrasi atau *school model* sistem pendidikan di dominasi oleh pemerintah yang berperan merencanakan, mengorganisasikan, dan memantau pelaksanaan pendidikan kejuruan.

C. Fungsi Pendidikan Menengah Kejuruan

Menurut Finch dan McGough (1982), pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak terlepas dari tiga dimensi yaitu *human*, *task* dan *environment*. Pertama, dimensi manusia (*human*). Dimensi ini meliputi hubungan antar manusia, kreativitas, tanggung jawab, fleksibilitas dan tujuan masa datang. Kedua, dimensi tugas

(task). Dimensi ini meliputi perencanaan, pengembangan, manajemen dan evaluasi. Ketiga, dimensi lingkungan (environment). Dimensi ini meliputi aspek sarana dan prasarana sekolah, masyarakat dan lapangan pekerjaan.

Menurut Djojonegoro (1998) tujuan pendidikan kejuruan adalah : 1) mempersiapkan siswa menjadi tenaga produktif; 2) memenuhi kebutuhan tenaga kerja dunia usaha dan industri; 3) menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan bagi orang lain; 4) merubah status siswa dari ketergantungan menjadi masyarakat yang berpenghasilan (produktif); dan 5) mempersiapkan siswa yang menguasai teknologi.

Miller et al (1986) menunjukkan terdapat 8 (delapan) prinsip dalam metode pendidikan kejuruan, yaitu : 1) Kesadaran terhadap karir, kesadaran akan karir merupakan bagian penting dalam pendidikan kejuruan khususnya pada proses awal pendidikan itu sendiri; 2) pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang menyeluruh dan merupakan bagian dari masyarakat; 3) kurikulum dalam pendidikan kejuruan berdasarkan atas permintaan pasar tenaga kerja; 4) pekerjaan merupakan salah satu pengembangan kurikulum pengajaran; 5) inovasi merupakan bagian penting dalam pendidikan kejuruan; 6) individu dipersiapkan untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja melalui pendidikan kejuruan; 7) keselamatan merupakan unsure penting dalam pendidikan kejuruan; dan 8) pengawasan dan peningkatan pengalaman akan diberikan dalam proses pendidikan.

Menurut Slamet (1994) pendidikan kejuruan mempunyai manfaat antara lain: 1) mempersiapkan kesiapan kerja; 2) membangun konsep diri; 3) mengembangkan jiwa kepemimpinan; 4) mempersiapkan pendidikan lanjutan; 5) memberikan dasar pendapatan; 6) memberikan persiapan karir; 7) menyesuaikan perubahan dalam perekonomian; menciptakan tenaga kerja terampil; 8) mengurangi pengangguran; menciptakan tenaga kerja dengan etos kerja tinggi; 9) meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; 10) menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas; 10) meningkatkan pembangunan.

D. Proses Pendidikan Menengah Kejuruan

Barlow (1974) menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan kejuruaan melalui beberapa proses pendidikan antara lain 1) pengalihan ilmu (*transfer of knowledge*) dan penimbaan ilmu (*acquisition of knowledge*) melalui pendidikan teoritis; 2) pencernaan ilmu (*digestion of knowledge*) melalui tugas, buku dan sumber akademis lain; 3) pembuktian ilmu (*validation of knowledge*) melalui praktek dan percobaan di laboratorium yang dilaksanakan secara empiris maupun simulasi (*virtual reality*); 4) pengembangan keterampilan (*skills development*) melalui praktek kerja di sektor usaha usaha sesuai dengan bidang kompetensi. Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruaan (SMK) di Jerman diselenggarakan dengan efektif dengan suatu jalinan kerjasama antara pendidikan dengan berbagai sector produktif antara lain perdagangan, jasa, dan industri. Hal ini memberikan dampak pada pengembangan SMK yang berkesinambungan di masa datang. SMK di Jerman merupakan kerjasama antar program pemerintah dan sektor industry tertentu. Pemerintah Jerman dan perusahaan sector industri memberikan pembiayaan kepada Sekolah Kejuruaan dengan perbandingan yang lebih besar pemerintah dibandingkan pihak industri (eduBENCHMARKING, 2008) .

Dalam ranah transformasi sumber daya manusia, pendidikan kejuruaan dapat mengalami perubahan paradigma dengan membangun pola pikir yang berorientasi dalam aspek permintaan pasar bukan penawaran. Dalam aspek historis, Amerika Serikat mempunyai perubahan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan proses pendidikan kejuruaan dan kualitas sumber daya manusianya (Finlay et al, 1998). Pemerintah Amerika Serikat memberikan dukungan dan dorongan terhadap produktifitas sektor pertanian dengan melakukan pengolahan dari sektor hulu hingga hilir. Hal ini dilaksanakan dengan merumuskan kebijakan pengembangan pendidikan melalui pembentukan lembaga pendidikan yang diarahakan terhadap kegiatan pengolahan dari hulu ke hilir pada sektor pertanian. Kebijakan tersebut berimplikasi terhadap kontribusi pendidikan kejuruaan dalam jalinan kerjasama terhadap aspek teknis sektor pertanian dari hulu hingga hilir. Peranan lembaga pendidikan kejuruaan adalah menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia dari berbagai jenjang pendidikan untuk bersinergi terhadap kebijakan pemerintah di Amerika Serikat.

Lebih lanjut, Finlay *et al* (1998) menunjukkan fenomena yang sama juga dilakukan di Negara Taiwan. Pemerintah Taiwan mempunyai dorongan dalam pengembangan sektor informal yang disinergikan dengan pengembangann teknologi terapan dalam perekonomiannya. Hal ini mendorong dilakukannya perumusan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan pendidikan kejuruaan dalam melaksanakan pengembangan teknologi terapan yang diimplemntasikan dari output pendidikan kejuruaan. Pendidikan kejuruaan di Negara Taiwan menciptakan sumber daya manusia dari berbagai jenjang pendidikan untuk mendukung pengembangan teknologi terapan pemerintah. Maslow (1994) menyatakan bahwa dorongan untuk kerja karena psikologi, keamanan, rasa memiliki, dan cinta, kepentingan-respek harga diri serta kebebasan, ingin informasi, mengerti, kecintaan dan keindahan aktivitas pribadi.

Menurut Inee (2011) dalam meningkatkan kualitas dan akses terhadap pendidikan kejuruaan adalah sebagai berikut: 1) meningkatkan standar kurikulum pendidikan kejuruaan kepada level yang dapat diperbandingkan dengan standar internasional; 2) meningkatkan insentif untuk peningkatan kemampuan dan kinerja pendidik; 3) meningkatkan peralatan dan peralatan laboratorium; 4) meningkatkan program beasiswa akademis untuk meningkatkan minat belajar peserta didik; 5) memastikan pendidikan kejuruaan dapat diakses secara luas; 6) menjalin kerjasama inovatif antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan pendidikan dan pemberian wawasan kepada peserta didik; 7) memonitoring standar kompetensi nasional menrefleksikan permintaan keahlian dan tenaga kerja.

E. Konsep dan Teori Sumber Daya Manusia

Dimensi sumber daya manusia meliputi jumlah, komposisi, karakteristik (kualitas), dan persebaran penduduk (Effendi, 1991). *Ulrich* (1998) menyatakan bahwa kunci sukses menghadapi sebuah perubahan ada pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dilain pihak SDM yang mempunyai kompetensi dunia adalah sumber daya manusia yang dapat mengikuti perubahan kualifikasi yang ditentukan oleh masyarakat global (Sugestiyadi, 2011). Keunggulan kompetitif suatu organisasi dalam

era global berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia (Mendonca dan Kanungo, 1996). Bryant dan White (1987) menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam proses pembangunan ekonomi dapat dicapai dengan cara; 1) penekanan pembangunan dengan memprioritaskan pada kapasitas pendidikan; 2) pembangunan harus menekankan pada upaya pemerataan; 3) pembangunan mengandung arti adanya peningkatan wewenang kepada kelompok masyarakat lemah atau kurang mampu; dan 4) pembangunan berkesinambungan antar negara dalam pengembangan pendidikan.

Menurut Greer (2001) kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menciptakan suatu keunggulan kompetitif. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mendorong suatu organisasi untuk berkompetisi yang didasarkan atas respon terhadap pasar, kualitas produk, pelayanan inovasi dan teknologi. Namun, dalam pandangan tradisional menekankan pada mobilisasi sumber daya manusia yang mudah berpindah dan pengendalian serta efisiensi sumber daya manusia. Oleh karena itu penerapan kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia akan mendorong sebuah perubahan dalam teknis dan kinerja yang lebih inovatif, progresif dan berproduktivitas tinggi.

1.5 Tipe Kajian

Tipe kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah tipe kajian deskriptif yaitu guna memberikan gambaran atau penjelasan tentang sejauh mana kontribusi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan keberpihakan pemerintah.

1.6 Hasil Kajian dan Pembahasan

A. Kondisi SMK: Antara Kesiapan dan Tantangan

Permasalahan yang awet dan krusial dalam pendidikan menengah kejuruan dari waktu ke waktu adalah tujuan yang akan dicapai dan upaya-upaya untuk mencapainya. Pendidikan menengah kejuruan diharapkan selalu selaras secara simbiosis dengan

kebutuhan dunia kerja dan mampu berwirausaha di sisi yang lain. Namun dalam kenyataannya tidak selalu demikian, karena keduanya memiliki dinamika kepentingan yang tidak selalu sama dan keduanya juga memiliki sistem yang tidak selalu kompatibel satu dengan lainnya serta keduanya juga memiliki kultur yang tidak mudah disatukan.

Oleh karena itu, untuk mengembangkan SMK yang berbasis kebutuhan dunia kerja dan mampu berwirausaha perlu kajian yang matang dan komitmen yang kuat. Kenapa butuh kajian yang matang dan komitmen yang kuat? karena fakta di lapangan pendidikan menengah kejuruan saat ini cenderung fokus pada fungsi tunggal yaitu menyiapkan siswanya untuk bekerja pada bidang tertentu sebagai pekerja/karyawan. Tujuan ini tidak salah, namun keanekaragaman kebutuhan masyarakat menuntut SMK menjalankan fungsi majemuk.

Jika fungsi majemuk yang dipilih, maka upaya-upaya yang perlu ditempuh untuk mencapainya harus juga majemuk. SMK Model merupakan terobosan baru yang dirancang untuk hal tersebut. Ditengah kelemahan-kelemahan pola pendidikan pada jenjang pendidikan SMK. Secara umum, kondisi SMK saat ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, SMK yang berada di Kabupaten Situbondo, kebanyakan hanya menyelenggarakan fungsi tunggal, yaitu menyiapkan lulusannya untuk bekerja. Fungsi-fungsi lain yang juga tidak kalah penting, masih belum dilaksanakan oleh sebagian besar SMK, misalnya pelatihan, pengembangan unit produksi/*teaching factory*, industri masuk SMK/ *teaching industry*, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan pengembangan bahan pelatihan. Akibatnya, sumber daya SMK terutama guru dan fasilitas sekolah belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga terjadi *idle capacity/under utilization*.

Pertanyaan yang muncul dibenak penulis selanjutnya adalah kenapa SMK hanya melaksanakan fungsi tunggal, dengan melupakan fungsi yang lain. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis hal tersebut terjadi karena dua sebab, antara lain:

1. Adanya tindakan kurang produktif sekolah dalam mengembangkan mekanisme “pelayanan dan pemberdayaan” pada masyarakat. Kesan tersebut muncul karena penyelenggaraan untuk hal tersebut di atas, memerlukan anggaran yang cukup

besar. Di mana sekolah tidak mampu meng-*cover* hal tersebut. Di sisi yang lain, namapaknya para guru sebagai pengajar dan penyelenggara nantinya, terlalu lelah dan fokus pada proses belajar mengajar. Karena kita ketahui jumlah siswa di SMK Negeri khususnya *overload*, hal tersebut terjadi karena peminat siswa untuk masuk SMK cukup tinggi untuk saat ini. walaupun ada kegiatan keterampilan, itu berlaku Untuk internal (siswa) seperti pengembangan unit produksi/*teaching factory*.

2. Tidak adanya dorongan kebijakan dan pendanaan yang memadai kepada SMK oleh Dinas pendidikan untuk menyelenggarakan pelatihan bagi karyawan perusahaan, pengembangan unit produksi/*teaching factory*, industri masuk SMK/*teaching industry*, lembaga sertifikasi profesi (LSP), tempat uji kompetensi (TUK) dan pengembangan bahan pelatihan. untuk masalah kebijakan dan pendanaan merupakn hal klasik untuk Kabaupaten Situbondo, pihak yang terkait terkesan masa bodoh.

Kedua, Kebanyakan SMK di Kabuupaten Situbondo saat ini menyiapkan siswanya hanya untuk bekerja pada bidang keahlian tertentu, seperti sebagai pekerja/karyawan/pegawai. Sangat sedikit sekali SMK yang sengaja menyiapkan siswanya untuk menjadi wirausahawan (pengusaha). Padahal, menurut Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2010), lulusan SMK yang diterima sebagai karyawan di sektor formal hanya 30 prosen dan yang 70 prosen bekerja di sektor informal (usaha mikro/kecil) yang tidak pernah dipersiapkan dengan baik oleh SMK. Oleh karena itu, SMK harus menyiapkan siswanya untuk menjadi karyawan danwirausahawan/pengusaha. Fakta yang tidak berpihak pada peersiapan sekolah tersebut, tentunya harus membuat sekolah berfikir dan merubah tidakan. Kalau sekolah tetap tidak melakukan reorientasi tindakan, maka sesungguhnya sekolah hanya menyiapkan pengangguran terdidik saja.

Reorientasi pola pembelajaran pada pendidikan menengah kejuruan dilakukan oleh SMK Negeri 1 Situbondo, dalam hal ini dengan melakukan merubah pola pendidikan dari hanya sekedar mempersiapkan lulusan yang ahli di bidang keahlian

tertentu sebagai pekerja/karyawan/pegawai, menjadi berbasis kewirausahaan. Kewirausahaan yang dikembangkan oleh SMK Negeri 1 Situbondo, memadukan antara kewirausahaan konvensional dengan perkembangan *Information Technology* (IT), di mana siswa diharapkan mampu memproduksi bahan produk teknologi dan mampu memasarkannya bukan hanya secara konvensional, akan tetapi juga melalui sistem IT. Apa yang dilakukan oleh SMK Negeri 1 Situbondo merupakan embrio penting bagi pengembangan SMK dan kewirausahaan, yang nantinya mampu di contoh oleh sekolah yang lain, dan juga mampu menjadi *rule model* oleh pemerintah buat SMK lain yang ada di Situbondo.

Ketiga, SMK di Kabupaten Situbondo kurang cepat tanggap terhadap tuntutan pembangunan ekonomi tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Di mana dalam tuntutan pembangunan ekonomi, dapat melalui potensi ekonomi lokal, kekayaan sumber daya natural dan kultural dan persaingan regional dan global yang belum ditanggapi secara cepat, cekat dan tepat. Jika demikian, peran SMK terhadap pembangunan ekonomi tidak akan optimal. Lambatnya SMK yang ada di Kabupaten Situbondo dalam merespon, melalui potensi ekonomi lokal, kekayaan sumber daya natural dan kultural, dapat terlihat dari banyaknya potensi lokal yang ada di Kabupaten Situbondo yang belum tergarap. Ketidak mampuan SMK dalam mengoptimalkan potensi yang ada, menyebabkan potensi bahari yang ada banyak diekspansi oleh orang atau pengusaha dari luar Situbondo. Ini baru pada potensi lokal, apalagi berbicara kompetisi nasional, regional, dan internasional jelas itu sulit untuk mampu bersaing dengan SDM lain.

Keempat, Kebanyakan belum ada keselarasan antara dunia kerja dengan pola pembelajaran SMK yang ada di sebagian besar SMK. Dalam dimensi kuantitas, kualitas, lokasi dan waktu belum terorganisir secara formal. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, tetapi wadah formal yang menjembatani dunia SMK dan dunia kerja belum ada. Maka peran pemerintah daerah, menjadi penting untuk terlibat dalam memediasi antara SMK dan dunia kerja. Terlebih setiap kota/kabupaten memiliki Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) bidang tenaga, yang diharapkan mampu secara teknis mendekatkan kemitraan antara SMK dan dunia kerja dan disamping itu pula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) juga memiliki data terkait kebutuhan kerja perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Situbondo. Namun dalam kenyataannya Disnakertrans ternyata tidak mampu menjadi mediator dan fasilitasi yang baik.

Kelima, Pembalikan proporsi peserta didik SMA : SMK di Kabupaten Situbondo berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dari 70 persen : 30 persen menjadi 30 persen : 70 persen, tingginya minat siswa untuk masuk SMK menuntut penyelenggaraan SMK yang mampu menjamin siswanya untuk memperoleh pekerjaan yang layak nantinya. Penjaminan terhadap siswanya untuk memperoleh pekerjaan yang layak merupakan tugas tidak mudah karena melibatkan banyak para pihak. Meskipun demikian, upaya-upaya untuk memastikan agar lulusan SMK segera memperoleh pekerjaan dan mampu berwirausaha merupakan tugas penting SMK, baik melalui pembelajaran yang bermutu tinggi dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja maupun melalui program-program bimbingan dan konseling kejuruan yang dirancang dengan baik.

Di sisi yang lain, tingginya minat siswa untuk masuk SMK juga tidak di barengi dengan jumlah SMK Negeri yang ada, berdasarkan data yang di dapat peneliti, jumlah SMK Negeri yang ada di kabupaten Situbondo hanya ada tiga SMK, yakni: SMKN 1 Situbondo, SMKN 2 Situbondo dan SMKN 1 Kendit. Kondisi tersebut sangat kontras dengan jumlah Sekolah Menengah Umum (SMU), yang hampir di setiap kecamatan ada. Minimnya keberadaan SMK di Kabupaten Situbondo ditengarai karena kurang responnya pihak terkait menyikapi laju perkembangan SMK dan antusiasme siswa untuk masuk SMK, sehingga yang terjadi banyak siswa harus memilih SMK swasta sebagai alternatif pilihan, yang kita ketahui bersama kualitas maupun kuantitasnya masih berada dibawah SMK negeri.

B. Keberpihakan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pengembangan SMK ?

Adanya otonomi daerah pula, membuat peran pemerintah kota/kabupaten sangat vital dalam besarnya anggaran pendidikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) yang dialokasikan untuk pendidikan, meskipun menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD untuk pendidikan sebesar 20 persen. Namun dalam prakteknya, seperti yang terjadi di Kabupaten Situbondo hal tersebut belum terjadi, di mana APBD Kabupaten Situbondo untuk pendidikan kurang dari 20 persen. Sebagai akibatnya, Pemerintah Kabupaten Situbondo belum mampu memberikan pelayanan pendidikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Rata-rata Angka Partispasi Sekolah (APS) di Kabupaten Situbondo untuk kelompok usia 13-15 tahun pada tahun 2014, kelompok 20 persen terkaya sudah mencapai 81,01 persen, sementara APS kelompok 20 persen termiskin baru mencapai 67,23 persen. Untuk usia 16-18 tahun, APS kelompok terkaya sebesar 75,62 persen dan APS kelompok termiskin hanya 28,52 persen. Dilain pihak data Kementerian Pendidikan Nasional (saat ini: Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah) menunjukkan bahwa di Kabupaten Situbondo sekitar 88,4 persen lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, dan 34,4 persen lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tidak melanjutkan ke SLTA. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terjadi kesenjangan antara penduduk miskin dan penduduk kaya.

Sulitnya masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan sebagai akibat tingginya beban biaya pendidikan, meskipun sudah ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), namun tidak dapat disangkal Pungutan Liar (Pungli) masih banyak, apakah mengatasnamakan sumbangan komite sekolah ataukah yang lainnya. Akibatnya angka putus sekolah sangat tinggi, sehingga berpotensi menciptakan masalah sosial serta pengangguran yang semakin tinggi. Meskipun penulis melihatnya juga angka putus sekolah juga disebabkan oleh faktor lain selain masalah ekonomi, yakni masalah keengganan orang tua dan siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun hal itu, bukanlah faktor dominan dibanding faktor biaya di atas. Beberapa data pengamatan dan faktual yang dilakukan oleh penulis mendapatkan

bantahan dari salah satu di Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, bahwa data di atas sesungguhnya memang ada, namun bukanlah faktor utama rendahnya siswa untuk melanjutkan ke jejang lebih tinggi.

Bahwa maksimalisasi kinerja penyelenggaraan pendidikan masih perlu ditingkatkan, untuk tidak mengatakan dipertanyakan? Karena selama bertahun-tahun kebijakan pendidikan yang katanya “pro publik”, sampai saat ini tidak sepenuhnya berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan publik. Di sisi yang lain, maraknya pungli dengan segala dalih dalam dunia pendidikan tidak serta merta juga dilakukan oleh oknum semata, dalam prakteknya pungli tersebut seringkali dilakukan dengan dasar “kebijakan” sekolah maupun komite sekolah. Kalau sudah seperti ini, apakah kita masih melihat pada penyelewengan segelitir orang saja, meskipun sesungguhnya hal tersebut merupakan dampak dari sistem yang kurang berpihak pada kepentingan dan kebutuhan rakyat.

Untuk mengubah kondisi tersebut, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, namun memerlukan tahapan-tahapan yang terencana dengan sistemik dan komprehensif, berkesinambungan, serta adanya kemauan politik (*political will*) dari pemerintah daerah dalam mewujudkan hal dimaksud. Terkait dengan kemauan politik (*political will*) dari pemerintah daerah (Kabupaten Situbondo), penulis melihatnya keberpihakan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas SMK nampaknya masih belum terlihat signifikan, terlihat belum adanya produk kebijakan lokal terkait pengembangan dan pengelolaan SMK, seperti Peraturan Daerah (Perda) dalam pengelolaan dan pengembangan SMK. Kondisi ini tentunya amat disayangkan oleh semua pihak.

1.7 Penutup

Berdasarkan pada hasil kajian dan pembahasan. Maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Tingginya antusiasme siswa untuk bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), juga tidak dibarengi dengan kesiapan sebagian besar SMK di Kabupaten

Situbondon untuk menyiapkan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang handal dan kompeten, sehingga hal tersebut pada akhirnya berdampak kurang optimalnya tujuan peningkatan sumber daya peserta didik.

2. Keberpihakan pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan SMK masih belum optimal, hal tersebut terlihat dari tidak adanya kebijakan makro berupa Peraturan Daerah (Perda) dalam pengelolaan dan pengembangan SMK. Sedangkan kebijakan secara mikro yang dilakukan oleh dinas terkait, masih belum optimal dan profesional dalam implementasinya, hal tersebut terlihat dari belum mempunya dinas pendidikan melakukan inovasi dalam pembinaan terhadap SMK.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad. 2001. *Seri Ilmu dan Sumber Daya Manusia: Psikologi Industri*. Liberty. Yogyakarta.
- Barnett, K dan Ryan, R. 2005. 'Vocational education and training in Australian schools: Issues for practitioners', *International Education Journal*, 5(5):89-104.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Preneda Media Group. Jakarta
- Denhardt, R. 1984. *Theories of Public Organization, Monterey*. Cole Publishing Company. Brooks.
- Depdiknas. 2008. *Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (SP2MP)*. Depdiknas. Jakarta.
- Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah. *Garis-Garis Besar Program Pembinaan SMK Tahun 2012*. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah. Jakarta.
- Djojonegoro, W. 1998. *Pengembangan sumber daya manusia melalui SMK*. PT. Jayakarta Agung Offset. Jakarta.
- Dunn, W.N. 1981. *Public Policy Analysis: An Introduction*. Prentice Hall. New Jersey.
- Sukmadinata, dkk. 2006. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, dan Instrumen)*. PT. Refika Aditama.
- Sumahamijaya, S. 2000. *Membina Sikap Mental Wirausaha*. Gunung Agung. Jakarta.
- Suryana. 2001. *Kewirausahaan*. Salemba Empat: Jakarta
- UNDP. 2004. *National Human Development Report 2004*. UNDP. Jakarta.
- Wagiran. 2010. 'Pengembangan Pendidikan Kejuruan Berbasis Potensi Daerah Dan Sumberdaya Alam Dalam Mendukung Continuing Vocational Education', *Seminar Internasional: Peran LPTK Dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia*.
- Internet:**
Data Pokok SMK Direktorat Pembinaan SMK. <http://datapokok.ditpsmk.net/>.diakses 1 februari 2015.